

Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd



Modul Pembelajaran-On line 2

MAKNA DAN BUTIR-BUTIR NILAI PANCASILA

E-Learning

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TAHUN 2019**

MODUL 2

MAKNA DAN BUTIR-BUTIR NILAI PANCASILA



Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa memahami pengetahuan (*knowledge*) tentang makna dan butir-butir dari nilai Pancasila yang pengamalannya dimanifestasikan dalam bentuk sikap (*attitude*) dan tindakan/perilaku (*psikomotor/softskill*) nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang Pancasila.

A. Pendahuluan

Pendidikan Pancasila merupakan suatu keniscayaan bagi bangsa Indonesia, terlebih warga negara yang masuk dalam kategori generasi millennial yaitu generasi yang lahir antara tahun 1980-an hingga 2000 atau generasi muda yang saat ini berusia antara 15-35 tahun, dan seluruh warga negara Indonesia. Sebab terjadi pasang surut pelaksanaan pembelajaran pendidikan Pancasila sebagai akibat dari dicabutnya Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1978, tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) atau Ekaprasetya Pancakarsa. P-4 tersebut kemudian menjadi salah satu sumber pokok materi Pendidikan Pancasila. Seiring dengan terjadinya peristiwa reformasi pada 1998, lahirlah Ketetapan MPR, Nomor XVIII/MPR/1998, tentang Pencabutan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa), maka sejak itu pula kegiatan Penataran P-4 tidak lagi dilaksanakan, termasuk pembelajaran pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi tidak ada lagi, ditiadakan dalam kurikulum dan digabung dengan pendidikan Kewarganegaraan..

Pancasila hampir dilupakan oleh bangsa Indonesia. Padahal Pancasila selain sebagai ideologi negara, juga sebagai dasar negara yang *notabene* sebagai dasar hukum dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai dasar hukum negara, Pancasila tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Meniadakan pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dapat dianalogkan dengan tidak mengakui eksistensi Pancasila sebagai dasar hukum negara. Pancasila wajib

dipahami dan diamalkan nilai-nilainya oleh seluruh warga negara Indonesia, tanpa terkecuali. Bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di muka hukum dan hak-hak azasi yang wajib dijunjung tinggi serta diakui keberadaannya.

Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam butir-butir setiap sila Pancasila adalah sebagai pedoman hidup bangsa (*guiding principles*). Mana mungkin Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa akan dapat tersosialisasikan nilai-nilainya kepada seluruh warga negara Indonesia, bila tidak ada pembelaran pendidikan Pancasila pada lembaga pendidikan. Nilai-nilai Pancasila inilah yang sebetulnya membentuk karakter bangsa Indonesia, sekaligus membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Tantangan lain yang cukup kompleks adalah adanya gelombang revolusi 4.0 yaitu revolusi komunikasi dan informasi dengan internet sebagai basis transformasi. Berkembangnya teknologi informasi (TI) membuat setiap warga negara Indonesia, yang pada umumnya sudah melek teknologi informasi menjadi lebih mudah untuk menerima dan menyerap produk kemajuan ilmu pengetahuan di satu sisi, sebagai dampak positifnya. Namun pada sisi lain, informasi-informasi yang diterima belum dapat disortir secara intensif, sehingga banyak dampak negatif yang diakibatkan oleh adanya informasi-informasi tersebut, yang tentunya bertentangan dengan norma-norma Pancasila. Contoh-contoh informasi yang berdampak negatif antara lain, adanya berita tentang kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual terhadap anak, teroris, persekusi, pornografi, infiltrasi kebudayaan, dan lain sebagainya.

Nilai-nilai Pancasila mengajarkan kepada setiap warga negara untuk dapat bersikap dan berbuat kebaikan, meningkatkan moralitas bangsa dan membentuk manusia Indonesia yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila. Menurut Ditjen Dikti (2016) Makna pembelajaran pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian, sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi, mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan *student centered learning*, untuk mengembangkan *knowledge, attitude, dan skill* mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun (*guiding principle*) sehingga menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*).



Gambar 1. Pancasila Ideologi Negara
Sumber: E-Book Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi

B. MAKNA PANCASILA

Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan, tetapi dalam kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya mahasiswa sebagai kaum intelektual, untuk berpartisipasi berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Agar partisipasi mahasiswa di masa yang akan datang efektif, maka perlu perluasan dan

pendalaman wawasan akademik mengenai dasar negara melalui mata kuliah pendidikan Pancasila.

Pancasila sebagai ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa tentu mengetahui bahwa setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber, seperti: kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan, artinya, berbagai komponen budaya yang meliputi: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan memengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Mahasiswa perlu mengetahui bahwa ketika suatu ideologi bertitik tolak dari komponen-komponen budaya yang berasal dari sifat dasar bangsa itu sendiri, maka pelaku-pelaku ideologi, yakni warga negara, lebih mudah melaksanakannya. Para pelaku ideologi merasa sudah akrab, tidak asing lagi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi yang diperkenalkan dan diajukan kepada mereka.

Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide *philosophische grondslag*. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem filsafat merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya, seperti: Notonagoro, Soerjanto Poespowardoyo, dan Sastrapratedja. Mereka termasuk segelintir pemikir yang menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan berbagai pemikiran para tokoh yang bertitik tolak dari teori-teori filsafat akan dibahas pada subbab tersendiri. Mahasiswa perlu memahami Pancasila secara filosofis karena mata kuliah Pancasila pada tingkat perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk

berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif, dan mendasar sebagaimana ciri-ciri pemikiran filsafat.

Pancasila sebagai sistem etika, di samping merupakan *way of life* bangsa Indonesia juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia untuk bersikap dan bertingkah laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah-akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Oleh karena itu, keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri sehingga menjadikan dunia ilmiah itu hampa nilai (*value-free*).

C. BUTIR-BUTIR NILAI PANCASILA

Nilai-nilai Pancasila, sebagai penuntun (*guiding principles*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah seharusnya diimplemtasikan oleh seluruh warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tersebut memberikan pedoman dan norma untuk membangun karakter warga negara, sehingga dapat menjadi warga negara yang baik (*good citizenship*). Pancasila memiliki nilai-nilai yang universal dan telah menjadi norma bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Menurut Ketetapan MPR RI No. I/MPR/2003 ada 45 butir nilai-nilai Pancasila sebagai penuntun (*guiding principles*) kehidupan tersebut, yaitu :

Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 7 butir :

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME

2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan YME sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan YME
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan YME
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME kepada orang lain.

Sila Kedua : Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 10 butir :

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa mebeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
8. Berani membela kebenaran dan keadilan
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia
10. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain

Sila Ketiga : Persatuan Indonesia

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 7 butir :

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika
7. Memanjukkan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa

Sila Keempat : Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 10 butir :

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil musyawarah
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur

9. Keputusan diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan musyawarah

Sila Kelima : Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ada 10 butir :

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
4. Menghormati hak orang lain
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum
9. Suka bekerja keras
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial

DAFTAR PUSTAKA

- Backy Krisnayuda, 2016, *Pancasila & Undang-Undang (Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Cetakan I, Prenadamedia Group, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2000, *Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila Di Perguruan Tinggi)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Jahroh, Windi Siti Jahroh dan Nana Sutarna. 2016. Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Moral.". *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan*.
- Kaelan, 2014, *Pendidikan Pancasila*, Edisi revisi kesepuluh,Paradigma, Yogyakarta.
- Kemenristekdikti. 2016. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Setjen Kemenristekdikti. Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila*. Jakarta : Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Paristiyanti Nurwandani, dkk, 2016, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pancasila*, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Jakarta.
- Suwarno, P.J., 1993,*Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Syahrial Syarbaini, 2014, *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- , 2018, *Pendidikan Pacasila*, PAMU Universitas Esa Unggul, Jakarta.